

**TATA KELOLA DOMAIN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDEKS SPBE
KOTA PANGKALPINANG**

Rania Oktarinasari

NPP. 31.0265

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 31.0265@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Etin Indrayani, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Pangkalpinang City Government Electronic-Based Government System Index in 2021 received the lowest index in the Bangka Belitung Islands Province with an Index of 2.10 while in 2022 there was an increase in the SPBE Index in 2022 to 2.22 or the 2nd lowest in the Bangka Belitung Islands Province. The cause of the low SPBE index is due to the SPBE management domain. **Purpose:** to find out the governance of the management domain of the Electronic-Based Government System, the causes of the low value of the SPBE index, Diskominfo's efforts in increasing the value of the SPBE index. **Method:** The research conducted took place at the Communication and Information Office of Pangkalpinang City which used a qualitative approach method with the theory used, namely the SPBE management domain based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 59 of 2020. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data is analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. **Result** The Pangkalpinang City Government is included in the preparation of the SPBE architecture and roadmap, it is necessary to make SOPs for information security standards, make SOPs for data management and alternative solutions to respond to non-digital data, make standardization infrastructure masterplans and SOPs for ICT assets, procurement planning and improve the quality and competence of human resources, increase knowledge for apparatuses that have supported digital government, require a series of gradual processes and occurrence technology gap with the knowledge and ability of SPBE users, and provide the widest possible opportunity for the Pangkalpinang City Regional Apparatus in making new or improving existing systems or applications. The implementation of infrastructure audits is carried out by ICT infrastructure data collection and monitoring and evaluation, the implementation of application audits requires cooperation with third parties and conducting SPBE security audits with third parties with standards set by ISO SMKI to obtain detailed and detailed audit results to be material for further evaluation and consideration. **Conclusion:** The Pangkalpinang City Government is preparing the SPBE architecture and plan map, the low value of the SPBE index is due to the absence of a legal basis and SPBE planning and limited human resource and budget conditions. The effort made is to prepare and complete the SPBE index policy domain. Suggestions that we can provide are making master plans, SOPs, planning human resource needs to improving competence and quality as well as procuring supporting infrastructure through each regional apparatus.*

Keywords: *SPBE index, management domain, roadmap.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 mendapatkan indeks terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indeks 2,10 sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada Indeks SPBE tahun 2022 menjadi 2,22 atau terendah ke-2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyebab rendahnya indeks SPBE disebabkan domain manajemen SPBE. **Tujuan:** untuk mengetahui tata kelola domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyebab rendahnya nilai indeks SPBE, upaya Diskominfo dalam meningkatkan nilai indeks SPBE. **Metode:** Penelitian yang dilakukan berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teori yang digunakan yaitu domain manajemen SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Pemerintah Kota Pangkalpinang masuk dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, perlu dibuat SOP standar keamanan informasi, membuat SOP Pengelolaan data dan alternatif solusi menyikapi data berbentuk non-digital, membuat masterplan infrastruktur standarisasi dan SOP aset TIK, perencanaan pengadaan serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, peningkatan pengetahuan bagi aparatur yang mempunyai mendukung pemerintah digital, membutuhkan suatu rangkaian proses bertahap dan terjadinya kesenjangan teknologi dengan pengetahuan dan kemampuan pengguna SPBE, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam pembuatan baru ataupun peningkatan sistem atau aplikasi yang sudah ada. Pelaksanaan audit infrastruktur dilakukan pendataan infrastruktur TIK serta monitoring dan evaluasi, pelaksanaan audit aplikasi diperlukannya kerjasama dengan pihak ke-tiga serta melakukan audit keamanan SPBE dengan pihak ke-tiga dengan standar yang telah ditetapkan ISO SMKI untuk mendapatkan hasil audit terperinci dan detail untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan selanjutnya. **Kesimpulan:** Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang melakukan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE, rendahnya nilai indeks SPBE disebabkan belum adanya dasar hukum dan perencanaan SPBE dan keterbatasan kondisi SDM serta anggaran. upaya yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan dan menyelesaikan domain kebijakan indeks SPBE. Saran yang dapat kami berikan yaitu membuat masterplan, SOP, perencanaan kebutuhan SDM hingga peningkatan kompetensi dan kualitas serta pengadaan infrastruktur pendukung melalui masing-masing perangkat daerah.

Kata kunci: *Indeks SPBE, Domain Manajemen, Peta Rencana*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini menjadikan teknologi semakin maju dan tidak lepas dari berbagai konsep-konsep yang memudahkan kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Hasil konsep tersebut merupakan suatu upaya pemecahan permasalahan yang terjadi atau upaya dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. Konsep-konsep baru yang ditemukan tidak hanya diaplikasikan dalam suatu perangkat namun diaplikasikan kedalam tatanan atau sistem kehidupan (Ronaning Roem et al., 2022, p. 8).

Konsep baru yang diaplikasikan dalam tatanan atau sistem kehidupan salah satunya yaitu kota cerdas atau *smart city* sebagai sesuatu bentuk upaya dalam mencapai kehidupan yang lebih layak dan sejahtera dengan konsep saat ini dan waktu yang akan datang secara berkelanjutan (Widiyastuti, ST.,

MT et al., 2021, p. 14). Kota cerdas atau *smart city* merupakan sebuah konsep pada suatu kota dengan seluruh sistem yang ada untuk menciptakan kemudahan bagi seluruh pihak dalam kota tersebut (Putra, 2019, p. 73). *Smart city* merupakan sebuah konsep penerapan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja perkotaan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menggunakan teknologi (Wibowo & Gamayanto, 2019, p. 44).

Secara harfiah bahwa *smart city* diartikan dengan konsep kota cerdas yang di rancang sedemikian rupa bersama penerapan dan perkembangan teknologi untuk kepentingan masyarakat serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Firmansyah, 2019, p. 126). *Smart city* sebagai suatu konsep yang merupakan pengelolaan dan pengembangan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui (*sensing*), memahami (*Understanding*), serta mengedalikan (*Controlling*) berbagai unsur dan sumber daya yang berada dalam suatu kota sehingga dapat lebih efisien dan efektif untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warganya selain itu konsep smart city mendukung pengembangan kehidupan yang berkelanjutan (Putra Ardinata et al., 2022, p. 35). *Smart City* atau kota cerdas berdasarkan buku panduan penyusunan *Masterplan Smart City 2017* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdapat enam dimensi yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment* (Kominfo, 2017)

Istilah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yaitu dari *smart governance* menjadi *e-government*. Pada Awalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan di Indonesia didukung dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia pada Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Peraturan tersebut merupakan langkah awal kebijakan untuk Pemerintah Indonesia dalam menerapkan *E-Government*. Berjalannya waktu dimana setelah adanya peraturan tersebut kemudian berbagai lapisan pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan mulai menerapkan *E-Government*.

Pada tahun 2018 untuk menegaskan hukum dalam penerapan E-Government Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Republik Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Penyebutan e-government dirubah menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang dikenal dengan SPBE merupakan proses penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perjalanannya dalam pengawalan penerapan SPBE Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan evaluasi SPBE pada setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahunnya. Penilaian predikat indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut:

Tabel 1

Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	2	3
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - < 3,5	Baik
4.	1,8 - < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sumber : Permen PAN&RB No. 5 Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa dalam penilaian indeks SPBE terdapat lima predikat yaitu memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan salah satu yang menerapkan SPBE. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPBE pada tahun 2021 dan 2022 Kota Pangkalpinang mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Berdasarkan tabel berikut merupakan hasil evaluasi indeks SPBE tahun 2021 dan 2022 Kota Pangkalpinang :

Tabel 2

Hasil Evaluasi SPBE Kota Pangkalpinang tahun 2021 dan 2022

No.	Tahun	Indeks SPBE	Predikat
1.	2021	2,10	Cukup
2.	2022	2,22	Cukup

Sumber : Keputusan MENPAN RB Nomor 1503 Tahun 2021 dan Keputusan MENPAN RB Nomor 108 Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas diketahui indeks SPBE Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 hanya mendapatkan 2,10 dari skala 5 dengan predikat cukup. Kemudian pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan indeks SPBE 0,12 menjadi 2,22 dengan predikat cukup. Indeks SPBE Kota Pangkalpinang terbilang rendah pada tahun 2021 dan 2022 jika dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil Indeks SPBE Kota Pangkalpinang tahun 2021 dan 2022 meleset dari target kinerja. Berdasarkan LKJIP Diskominfo Kota Pangkalpinang tahun 2022 pada tahun 2021 ditargetkan Indeks SPBE yaitu 2,20 tetapi pada realisasinya hanya mencapai 2,10. Kemudian pada tahun 2022 ditargetkan Indeks SPBE yaitu 2,50 tetapi pada realisasi hanya mendapatkan 2,22. Kondisi tersebut membuktikan bahwa dalam peningkatan Indeks SPBE di Kota Pangkalpinang belum berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu penyebab tertinggalnya indeks SPBE Kota Pangkalpinang dikarenakan salah satu domain yang mendapatkan nilai paling bawah yaitu domain manajemen dari tahun 2020-2022 mendapatkan nilai 1.00 dari 5.00. Nilai pada domain manajemen yang menjatuhkan indeks SPBE Kota Pangkalpinang menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait SPBE dan menjadikan domain manajemen menjadi fokus penelitian.

Penilaian evaluasi tingkat kematangan SPBE berdasarkan Permenpanrb Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai metode penilaian dengan tiga struktur yaitu domain yang merupakan area penerapan SPBE yang dinilai, aspek merupakan area penerapan SPBE yang dinilai dan indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai. Evaluasi tingkat kematangan SPBE terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 Indikator

Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) mencakup sejumlah domain atau bidang kegiatan yang terkait dengan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Merupakan salah satu domain dari empat domain yang ada dalam SPBE. Domain Manajemen SPBE mempunyai bobot 16,5% dengan pembagian penerapan manajemen SPBE 12% dan audit TIK 4,5% (Darmawan, 2022)

Pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah di Kota Pangkalpinang dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai perangkat daerah utama dalam penyelenggaraan SPBE. Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2022 sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di kota Pangkalpinang. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara SPBE di Kota Pangkalpinang yaitu Dinas komunikasi dan Informatika dengan Kepala Dinasnya sebagai Kepala Penyelenggara SPBE. Hal tersebut kemudian dalam pelaksanaannya diterapkan dengan adanya bidang Penyelenggaraan E-Government di Diskominfo Kota Pangkalpinang.

Indeks SPBE yang dinilai rendah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2022 disebabkan oleh masih belum optimalnya kerjasama dan koordinasi dalam pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE), belum terfasilitasi dan terintegrasi penyelenggara SPBE, penganggaran dan perencanaan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung SPBE yang masih belum optimal, tata kelola administrasi pemerintahan dan budaya kerja birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik dan belum optimalnya pengaturan pengelolaan dan manajemen sumber daya aparatur yang menguasai keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam memperbaiki penerapan dan pengembangan SPBE.

Kendala utama yaitu dari aspek infrastruktur TIK dalam penerapan dan pengembangan SPBE berupa pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana infrastruktur TIK (Arief, & Yunus Abbas, 2021). Kendala sumber daya manusia yang berkompeten di bidang TIK dan SPBE (Awaludin, 2019). Kendala akibat terbatasnya anggaran atau pendanaan dalam penerapan dan pengembangan SPBE terutama dalam peralihan teknologi dari tradisional menjadi modern yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit (Amri et al., 2022)

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ditemukan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Peneliti tertarik untuk mengangkat topik penerapan dan pelaksanaan SPBE dengan menganalisa berdasarkan domain manajemen SPBE yang terdiri dari dua aspek yaitu aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK. Manajemen SPBE diperlukan dalam sebagai upaya dalam peningkatan kualitas suatu pemerintah dalam penerapan SPBE (Nursetiawan & Putra, 2021)

Penelitian terkait dengan penerapan pelaksanaan SPBE terutama domain manajemen masih jarang dilakukan terutama untuk Kota Pangkalpinang sehingga menjadi sebuah penelitian yang baru terkhusus untuk Kota Pangkalpinang dalam penerapan SPBE. Penelitian ini difokuskan pada Domain Manajemen SPBE dikarenakan nilai indeks SPBE Kota Pangkalpinang pada domain manajemen mempunyai nilai 1,00. Sehingga peneliti melakukan fokus pada domain manajemen.

Dikarenakan keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan dan sektor SPBE yang luas sehingga peneliti melakukan batasan dengan melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terkait dengan penerapan SPBE. Sehingga peneliti mengambil judul **“TATA KELOLA DOMAIN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai referensi dari berbagai jurnal penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dan telah di publikasikan sebelumnya penggunaan jurnal penelitian tersebut sebagai referensi untuk peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini. pemilihan jurnal penelitian ini berdasarkan topik pembahasan, konsep ataupun teori yang digunakan. Penelitian pertama yang dilakukan

Rahmatullah pada tahun 2021 tentang analisis penggunaan konsep *smart governance* dalam paradigma *smart city* di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teori yang digunakan *smart city bovd cohen (2013)* (Rahmatullah, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengimplementasikan konsep smart governance dalam penerapan smart city berdasarkan teori Cohen Boyd yaitu dengan adanya enabling supplu and demand side policy, transparency and open data, dan ICT and e-government. Penelitian kedua yaitu oleh Affandi pada tahun 2023 tentang analisis *smart governance* di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Smart Governance di Kota Makassar masih belum maksimal diterapkan. Terdapat faktor penghambat berupa perubahan regulasi, dan fasilitas pelayanan yang kurang mendukung, sedangkan faktor pendukung berupa adanya kondisi sosial masyarakat, sumber daya manusia, dukungan teknologi dan dukungan pemangku kepentingan (Affandi et al., 2023).

Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan Taqiya pada tahun 2020 tentang analisis tingkat kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian campuran dengan teori yang digunakan teori rangka kerja Cobit 4.1. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui Diskominfo Jawa Timur telah berhasil menerapkan SPBE level 3 menurut COBIT 4.1 yang mana telah melakukan dokumentasi dan standarisasi kebijakan prosedur SPBE (Taqiya et al., 2020). Penelitian keempat yaitu yang dilakukan oleh Sarofah pada tahun 2022 tentang transformasi pemerintah lokal : penerapan *smart governance* melalui konsep kolaboratif di Indonesia. Peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teori yang digunakan *smart governance Pentahelix*. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa adanya penerapan smart governance yang dipengaruhi oleh integrasi, kolaborasi dan kepemimpinan serta perkembangan infrastruktur informasi dan komunikasi. Terdapat tantangan dalam penerapan smart governance yaitu masih adanya pelayanan publik yang belum dapat terintegrasi baik antar lembaga ataupun antar instansi (Sarofah, 2022). Penelitian kelima yaitu yang dilakukan Arief dan Yunus Abbas pada tahun 2021 tentang Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan e-government dapat dikelompokkan dalam tujuh kategori yaitu budaya, geografis, ekonomi, politik, kebijakan, sumber daya manusia, dan infrastruktur TI (Arief, & Yunus Abbas, 2021).

Penelitian keenam yaitu yang dilakukan oleh Mahakrisna, Ananda dan Poetri pada tahun 2023 mengangkat judul yaitu Implementasi Sistem Pemerintahan Berbabsis Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Tabanan. Penelitian tersebut menggunakan metode ualitatif. Isu yang dibahas pada penelitian tersebut berkenaan dengan implementasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan indeks SPBE diwilayah tersebut (Prawira et al., 2023). Penelitian ketujuh oleh Wahyuni pada tahun 2023 berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitiannya menekankan pada materi penerapan SPBE di Provinsi Sumatera barat dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ke delapan yang berjudul Aplikasi Manajemen Risiko SPBE berbasis Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, ditulis oleh Zulfitra dan Ayungnityas pada tahun 2023 (Zulfitra & Ayungnityas, 2023). Penelitian ini membahas tentang aplikasi manajemen risiko SPBE berbasis website dengan menerapkan metode *System Deveploment Life Cycle (SDLC)* dalam melakukan proses analisis risiko otomatis menghitung level kriteria yang menghasilkan nilai besaran risiko dan membantu mengumpulkan laporan tepat waktu.

Penelitian kesembilan yang berjudul Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Akseibilitas Pelayanan Publik di Indonesia oleh Laili, Try Hajar, Ridho dan

Rohmah pada tahun 2023. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang diperkuat dengan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terkait (Choirunnisa et al., 2023). Penelitian terakhir oleh Madya Putra Yaumil Ahad dan Adityo Nugraha Barsei. Penelitian yang ditulis pada tahun 2023 tersebut mengangkat judul Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintahan Daerah di Indonesia Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar guna mendapatkan informasi mengenai implementasi *collaborative governance* SPBE (Madya Putra Yaumil Ahad & Nugraha Barsei, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan mempunyai keterbaruan yaitu dengan membahas terkait dengan upaya peningkatan indeks SPBE melalui salah satu domain. Penelitian ini masih jarang dilakukan dikarenakan dalam penelitian lainnya melakukan pembahasan secara umum pada SPBE selain itu untuk di Kota Pangkalpinang masih sedikit yang melakukan penelitian terkait dengan upaya peningkatan indeks SPBE Kota Pangkalpinang

1.5. Tujuan.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui tata kelola domain manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai upaya peningkatan indeks SPBE Kota Pangkalpinang, penyebab rendahnya nilai indeks SPBE khususnya domain manajemen dan upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan indeks SPBE khususnya domain manajemen di Kota Pangkalpinang.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan mengacu kepada pendekatan penelitian metode kualitatif yang secara nyata terjun ke lapangan dengan proses pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Nurdin & Hartati, 2019, p. 51). Operasional konsep yang digunakan yaitu domain manajemen SPBE Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder (Suandi et al., 2016). Peneliti sebagai instrument utama yang berfungsi untuk fokus penelitian, membuat kesimpulan, menafsirkan data, analisis data, menilai kualitas data, melakukan pengumpulan data dan memilih informan sebagai sumber data (Wasistiono & Simangunsong, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Samsu, 2017, p. 93). Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penggambaran kesimpulan (Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dengan tentang tata kelola domain manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai upaya peningkatan indeks SPBE Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

3.1. Tata Kelola Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Indeks SPBE Kota Pangkalpinang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 1 angka 1 di jelaskan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ini merupakan sistem sebagai wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memanfaatkan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini untuk memberikan dampak peningkatan kualitas pemerintah serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah dan juga layanan publik yang lebih baik (Arief, & Yunus Abbas, 2021)).

Pemantauan dan evaluasi SPBE termasuk kedalam rangkaian pengukuran pencapaian program reformasi birokrasi dimana penilaian tersebut merupakan penilaian dengan indeks komposit yang tersusun atas beberapa hasil indeks penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi yang mana salah satunya adalah penilaian dan penerapan SPBE.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam upaya untuk mengetahui serta mengukur perkembangan penerapan SPBE yang ada di Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat dengan cara membuat Tim Koordinasi SPBE untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan pada Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penelitian yang dilakukan mempunyai fokus terhadap Domain Manajemen SPBE dikarenakan mendapatkan penilaian Indeks 1,00 pada tahun 2022 yang merupakan nilai dasar terendah yang ada. Manajemen SPBE merupakan suatu rangkaian proses dalam mencapai penerapan SPBE yang berkesinambungan, efisien, dan efektif serta layanan SPBE yang berkualitas. Domain manajemen SPBE merupakan domain ke-tiga dan mempunyai dua aspek yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK.

3.1.1. Aspek Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pangkalpinang

Aspek merupakan area penerapan SPBE yang dinilai. Aspek penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu dari dua aspek dari domain manajemen SPBE. Aspek penerapan manajemen SPBE mempunyai delapan indikator dengan bobot aspek mencapai 12%. Kota Pangkalpinang mendapatkan nilai aspek penerapan manajemen SPBE pada tahun 2022 yaitu 1,00 dengan seluruh indikator mendapatkan nilai 1,00. Berikut merupakan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari indikator dalam aspek penerapan manajemen SPBE.

Manajemen risiko berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2019 Pasal 47 dijelaskan bahwa manajemen risiko mempunyai tujuan untuk dapat menjamin kelangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penerapan dan pelaksanaan SPBE. Manajemen risiko dilakukan dengan serangkaian proses berupa proses evaluasi, pemantauan, pengendalian, analisis dan identifikasi terhadap kemungkinan adanya risiko dalam SPBE. Manajemen risiko SPBE di Kota Pangkalpinang untuk saat ini sudah masuk kedalam tahap penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE yang mana memberikan arah dan tujuan ke mana pengembangan dan penerapan SPBE kedepannya yang salah satunya terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko SPBE di Kota Pangkalpinang.

Manajemen keamanan informasi merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi SPBE dari aspek penerapan manajemen SPBE. Pedoman manajemen keamanan informasi diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (Nomor 4 tahun 2021) tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE. Manajemen keamanan informasi menjadi salah satu indikator dalam pemantauan

dan evaluasi SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE. Manajemen keamanan berdasarkan Pasal 1 angka 4 di jelaskan sebagai suatu rangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang berkesinambungan, efektif dan efisien serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen keamanan informasi mempunyai tujuan untuk dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan penerapan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Manajemen keamanan informasi belum dapat berjalan optimal dikarenakan masih adanya ego sektoral dari dinas atau badan yang ada di Kota Pangkalpinang yang belum mau menyerahkan datanya untuk dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tidak dapat menjamin keamanan data tersebut. Selain itu untuk kualitas keamanan pusat data di Kota Pangkalpinang dinilai dapat di apresiasi dikarenakan kepercayaan akan SDM yang memiliki kualitas dan kemampuan terhadap keamanan digital serta menggunakan penyimpanan berlapis dengan pemisahan pusat penyimpanan data menjadi beberapa penyimpanan untuk mengurangi kerugian jika terjadi kegagalan sistem keamanan.

Manajemen data merupakan salah satu indikator dalam pemantauan dan evaluasi SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE. Manajemen data mempunyai tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang dapat diakses, terintegrasi, mutakhir, dan akurat sebagai dasar dari pengendalian, evaluasi, pelaksanaan, dan perencanaan pembangunan nasional. Manajemen data mempunyai suatu rangkaian proses yaitu pengelolaan arsitektur data, basis data, data referensi, data induk dan kualitas data. Manajemen data SPBE di atur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020. Data pada Pasal 1 Angka 3 didefinisikan sebagai sebuah catatan atas kumpulan deskripsi atau fakta berupa bunyi atau suara, tulisan, isyarat, tanda, peta, gambar, simbol, karakter dan angka yang menggambarkan kondisi sebenarnya atau menunjukkan suatu situasi, kondisi, objek dan ide.

Manajemen data berhubungan dengan interoperabilitas yang merupakan sebuah kolaborasi dan koordinasi antar sistem elektronik pemerintah yang melingkupi pertukaran dan pengaksesan data atau bagi pakai data (Yuhefizar et al., 2019). Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dan analisis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu didapatkan bahwa kondisi manajemen data di Kota Pangkalpinang masih belum optimal meskipun sudah memulai perencanaan walidata dan pusat data dan perlu adanya pembuatan SOP Pengelolaan data dan peraturan yang mengatur terkait dengan data dan perlu adanya alternatif solusi yang ditawarkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi data yang berbentuk konvensional atau non-digital.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator dalam pemantauan dan evaluasi SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tujuan untuk dapat menjamin ketersediaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Proses dilakukannya manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi yaitu sebagai rangkaian proses penghapusan, pengelolaan, pengadaan dan perencanaan perangkat lunak dan keras yang digunakan dalam SPBE.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai leading sector SPBE di Kota Pangkalpinang menjadi fokus utama peningkatan sarana dan prasarana SPBE mengingat bahwa menjadi leading sector mempunyai tanggung jawab besar untuk mempunyai sistem yang mumpuni serta memiliki fasilitas server sebagai pengelolaan dan penyimpanan digital. Kondisi manajemen aset TIK di Kota Pangkalpinang pada dasarnya terhambat pada keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut perlu dilakukan perencanaan dengan membuat masterplan infrastruktur SPBE Kota Pangkalpinang yang membuat standarisasi aset sehingga dalam pengadaan aset tidak hanya menjadi tumpuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tetapi menjadi kebutuhan bersama dengan adanya standarisasi dan SOP Aset berdasarkan masterplan infrastruktur SPBE untuk pengarah dan penataan yang terstruktur dan terencana kedepannya.

Manajemen sumber daya manusia merupakan rangkaian proses pendayagunaan, pembinaan, pengembangan, dan perencanaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal penting yang perlu diperhatikan selain berbicara terhadap sistem dan infrastruktur. SDM menjadi dasar pelaksanaan suatu proses kehidupan. Kondisi SDM di Kota Pangkalpinang saat ini sudah masuk ketahap pengajuan usulan pengadaan SDM kepada BKD Kota Pangkalpinang untuk pranata komputer dimasing-masing perangkat daerah dan memberikan tupoksi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tidak digunakan untuk hal lainnya. Kondisi tersebut menjadi penting dikarenakan keterbiasaan pekerjaan dapat mengubah atau menghilangkan kemampuan yang dimiliki oleh SDM (Awaludin, 2019). Kondisi SDM IT di Kota Pangkalpinang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kondisi yang belum terpenuhi secara kualitas dan kuantitas sehingga perlu adanya perencanaan SDM baik dilakukannya pengadaan SDM serta peningkatan SDM dengan cara pelatihan ataupun peningkatan kompetensi melalui berbagai cara yang tersedia.

Manajemen pengetahuan merupakan proses yang dilakukan dalam mendokumentasikan pengetahuan dan pengalaman dalam evaluasi, implementasi dan perencanaan SPBE guna meningkatkan dukungan dan kualitas layanan SPBE guna mendukung pengambilan keputusan SPBE. Pengetahuan itu sendiri menjadi nilai yang penting dalam proses pengembangan kemajuan kehidupan terutamanya teknologi untuk dapat memahami apa dan bagaimana sekarang dan kedepannya yang perlu dilakukan dan direncanakan yang mana hal tersebut merupakan bagian dari pengetahuan (M. Khairul Anam et al., 2021)

Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan peningkatan dengan melakukan pengadaan pelatihan dan diklat untuk aparatur dengan Tupoksi pemerintah digital. Manajemen pengetahuan di Kota Pangkalpinang perlu dibuat perencanaan atau masterplan sehingga dapat memberikan gambaran dan melakukan studi banding terhadap pemerintah yang dinilai sudah unggul dalam penerapan manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan menjadi penting untuk penerapan dan perkembangan TIK kedepannya. Perlu dilakukannya peningkatan terhadap pengetahuan SDM di Kota Pangkalpinang terutama bagi tupoksi pemerintah digital serta pranata komputer di Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang melalui studi banding, diklat, bimtek serta beasiswa studi lanjutan sebagai bentuk proses peningkatan pengetahuan.

Manajemen perubahan merupakan suatu rangkaian proses evaluasi, pemantauan, implementasi, pengembangan, analisis dan proses perencanaan terhadap perubahan SPBE. Transformasi digital menjadi salah satu yang diperhatikan saat ini dimana komposisi aparatur yang mana mempunyai kebiasaan bekerja secara tradisional dan semakin berkembangnya teknologi menyebabkan terjadinya selisih kondisi potensi teknologi terhadap kemampuan pengguna teknologi (Junaidi, 2021)

Transformasi sistem pemerintah dari tradisional menjadi digital di Kota Pangkalpinang diakui masih belum sempurna akibat belum terbiasanya penggunaan teknologi serta perubahan cara sistem kerja yang telah diterapkan secara lama. Tetapi pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan perbaikan dengan harapannya memberikan dampak yang baik kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang serta masyarakat Kota Pangkalpinang meskipun bergerak secara perlahan dalam penerapan dan implementasinya. Transformasi digital dalam pemerintah memerlukan suatu rangkaian proses bertahap akibat terjadinya kesenjangan kondisi teknologi dengan pengetahuan dan kemampuan pengguna.

Manajemen layanan merupakan suatu rangkaian proses pelayanan kepada pengelolaan, pengoperasian, dan pengguna aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkualitas dan berkesinambungan. Manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangkaian proses pengaplikasian SPBE agar dapat berjalan dengan berkualitas dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara informan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

didapatkan bahwa dalam manajemen layanan SPBE di Kota Pangkalpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah lainnya terkait dengan sistem elektronik ataupun dengan aplikasi SPBE baik berupa pembuatan baru ataupun peningkatan sistem atau aplikasi yang sudah ada.

3.1.2. Aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Pangkalpinang

Audit infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan tata cara dan standar pelaksanaan audit infrastruktur SPBE. Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE di Kota Pangkalpinang dalam prosesnya belum menggunakan pihak ke-tiga untuk proses audit sedangkan untuk infrastruktur di Kota Pangkalpinang masih berkaitan dengan kebutuhan utama yaitu internet serta infrastruktur pendukung sederhana lainnya. Pendataan sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi untuk saat ini masih bertahap pada masing-masing perangkat daerah.

Audit aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan tata cara dan standar pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Audit aplikasi SPBE perlu dilakukan dengan pihak ke-tiga yang mempunyai kemampuan atau kualifikasi terhadap audit aplikasi sehingga mengetahui hasil berdasarkan standar yang digunakan (Supriyanto et al., 2021).

Pelaksanaan audit aplikasi SPBE di Kota Pangkalpinang untuk saat ini berada di tahap audit internal dengan kegiatan setiap semester melakukan pendataan kepada masing-masing perangkat daerah untuk mengetahui aplikasi atau sistem yang digunakan atau masih aktif dan tidak aktif di Kota Pangkalpinang. Pelaksanaan audit aplikasi SPBE di Kota Pangkalpinang masih dilakukan secara internal tanpa menggunakan standarisasi yang berlaku sehingga perlu adanya perencanaan kedepannya untuk melakukan audit aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak ke-tiga.

Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan tata cara dan standar pelaksanaan audit keamanan SPBE. Sistem keamanan mempunyai standarisasi yang diketahui dengan ISO SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Leksono et al., 2018). Pemerintah Kota Pangkalpinang memandang sistem keamanan yang dimiliki sudah aman dikarenakan belum pernah ada kasus pembobolan atau pencurian data. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum pernah melakukan audit keamanan SPBE dan perlu adanya audit dengan standar yang telah ditetapkan yaitu ISO SMKI untuk mendapatkan hasil audit terperinci dan detail berdasarkan standar yang berlaku sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan selanjutnya.

3.2. Penyebab Rendahnya Nilai Indeks SPBE Khususnya Domain Manajemen Di Kota Pangkalpinang

Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penilaian SPBE pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan indeks 2,10 dan 2,22 dengan predikat cukup, indeks tersebut pada tahun 2021 menjadi indeks SPBE Pemerintah Daerah paling rendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi No.2 terbawah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa penyebab rendahnya nilai indeks spbe itu disebabkan oleh domain ke-tiga yaitu manajemen dan audit yang mendapatkan indeks satu. Kemudian tidak adanya dasar hukum dan perencanaan dalam SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang menjadikan indeks rendah. Penyebab rendahnya Indeks disebabkan juga oleh kondisi SDM yang terbatas yang diperparah dengan anggaran yang terbatas.

Perbaikan domain manajemen yang menjadi sebab rendahnya indeks SPBE baru dapat diperbaiki ketika sudah memperbaiki domain-domain sebelumnya seperti domain kebijakan yang menjadi dasar SPBE di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya nilai Indeks SPBE di Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Belum adanya dasar hukum dan perencanaan SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang;

2. Terbatasnya kondisi SDM di Kota Pangkalpinang dalam mendukung penerapan SPBE; dan
3. Keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama untuk SPBE;

3.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Dalam Meningkatkan Indeks SPBE Khususnya Domain Manajemen Di Kota Pangkalpinang

Rendahnya indeks SPBE Kota Pangkalpinang membuat Dinas Komunikasi dan Informatika tidak tinggal diam sehingga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks SPBE. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan upaya dalam meningkatkan indeks SPBE diketahui bahwa mempersiapkan dan menyelesaikan domain kebijakan indeks SPBE dan dilanjutkan membuat gambaran strategi umum dalam peningkatan indeks SPBE. Menyelesaikan arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Pangkalpinang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mempunyai perbedaan Teori smart Governance yang digunakan berbeda, teknik pengumpulan data terdapat wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data serta tujuan penelitian berupa penerapan smart governance dalam upaya meningkatkan Indeks SPBE serta perbedaan lokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah pada tahun 2021 tentang Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam Paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian mempunyai perbedaan lokus penelitian, tujuan penelitian dimana peneliti mengkaitkan dengan indeks SPBE, penggunaan teori Smart Governance dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi pada tahun 2023 tentang analisis *smart governance* di Kota Makkassar.

Perbedaan selanjutnya yaitu terkait dengan Lokus penelitian yang berbeda, tujuan penelitian yang berbeda, penggunaan teori yang berbeda, dan teknik analisis data yang digunakan berbeda dengan penelitian Taqiya pada tahun 2020 tentang analisis tingkat kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Kemudian mempunyai perbedaan Lokus penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yang berbeda karena tidak berhubungan dengan SPBE, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan Sarofah pada tahun 2022 tentang Transformasi Pemerintah Lokal: Penerapan Smart Governance melalui Konsep Kolaboratif di Indonesia. Terakhir mempunyai perbedaan lokus penelitian, tujuan penelitian dimana tidak membahas smart governance, metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan Arief dan Yunus Abbas pada tahun 2021 tentang Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian yang dilakukan terkait dengan tata kelola domain manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai upaya peningkatan Indeks SPBE Kota Pangkalpinang mendapatkan sebuah temuan menarik bahwa perlu adanya standarisasi aset atau sarana prasarana TIK dan *masterplan* yang berkesinambungan, peningkatan kemampuan SDM terutama terkait ahli di bidang teknologi informasi dan kebijakan terkait data berbentuk non-digital yang masih ada hingga saat ini.

IV. KESIMPULAN

Penelitian yang dapat disimpulkan Pemerintah Kota Pangkalpinang masuk dalam penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai upaya perencanaan manajemen risiko selanjutnya, perlu dibuat SOP standar keamanan informasi, membuat SOP Pengelolaan data dan alternatif solusi menyikapi data berbentuk non-digital, membuat masterplan infrastruktur standarisasi dan SOP aset TIK, perencanaan pengadaan serta peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, peningkatan pengetahuan bagi aparatur yang mempunyai mendukung pemerintah digital, membutuhkan suatu rangkaian proses bertahap dan terkadinya kesenjangan teknologi dengan pengetahuan dan kemampuan pengguna SPBE, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dalam pembuatan baru ataupun peningkatan sistem atau aplikasi yang sudah ada. Sedangkan untuk aspek audit teknologi informasi dan komunikasi Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan audit infrastruktur dilakukan pendataan infrastruktur TIK serta monitoring dan evaluasi, pelaksanaan audit aplikasi diperlukannya kerjasama dengan pihak ke-tiga serta melakukan audit keamanan SPBE dengan pihak ke-tiga dengan standar yang telah ditetapkan ISO SMKI untuk mendapatkan hasil audit terperinci dan detail untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan selanjutnya. Penyebab rendahnya nilai Indeks SPBE Kota Pangkalpinang khususnya domain manajemen yaitu belum adanya dasar hukum dan perencanaan SPBE di Pemerintah Kota Pangkalpinang, terbatasnya kondisi SDM di Kota Pangkalpinang dalam mendukung penerapan SPBE, dan keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang terutama untuk SPBE. 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan Indeks SPBE Khususnya Domain Manajemen di Kota Pangkalpinang yaitu dengan mempersiapkan dan menyelesaikan domain kebijakan indeks SPBE dan dilanjutkan membuat strategi umum dalam peningkatan indeks SPBE serta menyelesaikan arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Pangkalpinang

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan pengetahuan terkait dengan hal teknis yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE terkhusus domain manajemen yang menjadi fokus utama penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti mengetahui dengan sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu dilakukan pengembangan analisis secara teknis serta memperhitungkan terkait analisis perencanaan dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mendapatkan keakuratan analisis penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika IPDN khususnya Dosen Pembimbing serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Nawawi, J., & Syamsu, S. (2023). Analisis Smart Governance di Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal ...*, 9. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/10833%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/10833/6285>
- Amri, U., Adianto, & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik*

- Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis. *JANITRA (Jurnal Administrasi Pemerintahan)*, 2(April), 13–24.
- Firmansyah, Y. (2019). Penerapan Konsep Jakarta Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017. *Public Administration Journal*, 3(2), 125–144.
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi. *Ekasakti Educational Journal*, 1(2), 278–292.
- Kominfo. (2017). *buku panduan smart city*.
- Leksono, S. A. A., Gibran, I., Maulana, R., Bagaskara, M. R., & Prastyawan, Z. G. (2018). Manajemen proyek it pembuatan sistem informasi bimbingan belajar (studi kasus: bimbingan belajar SCIENTIA). *Seminar Nasional Informatika, Sistem Informasi Dan Keamanan Siber*, 1(1), 216–221.
- M. Khairul Anam, Tri Putri Lestari, Latifah, Muhammad Bambang Firdaus, & Sofiansyah Fadli. (2021). Analisis Kesiapan Masyarakat Pada Penerapan Smart City di Sosial Media Menggunakan SNA. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5(1), 69–81. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2742>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendikia.
- Nursetiawan, I., & Putra, R. A. K. (2021). Urgensi Penerapan Smart Governance Dalam Prespektif Pelayanan Publik Di Desa Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 162–170. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5098>
- Putra, A. S. (2019). SMART CITY : KONSEP KOTA PINTAR DI DKI JAKARTA. *Jurnal Tekninfo*, 20(2), 73–79.
- Putra Ardinata, R., Rahmat, H. K., Andres, F. S., & Waryono, W. (2022). Kepemimpinan Transformasional Sebagai Solusi Pengembangan Konsep Smart City Menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur Transformational Leadership As a Solution for the Development of the Smart City Concept in the Society Era: a Literature Review. *Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research*, 1(1), 33–44.
- Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Ijd-Demos*, 3(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87>
- Ronaning Roem, E., Sarmiati, S., & Fortunela, D. F. (2022). Audit Komunikasi Penerapan Konsep Smart City Melalui Program Smart Governance Di Diskominfo Kota Padang. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 8–13. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.952>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development. In Rusmini (Ed.), *Pustaka Jambi* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Sarofah, R. (2022). Transformasi Pemerintah Lokal : Penerapan Smart Governance Melalui Konsep Kolaboratif Di Indonesia. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 20(1), 372–378.
- Suandi, I. N., Agung, A. A. G., CANDIASA, I. M., Suastra, I. W., Tika, I. N., Pageh, I. made, & Dantes, G. R. (2016). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, TA, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi. In S. P. D. I. Nengah (Ed.), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, TA, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*

- (1st ed.). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171. <https://doi.org/10.36055/12952>
- Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>
- Wasistiono, P. S., & Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.
- Wibowo, S., & Gamayanto, I. (2019). Konsep Dan Strategi Pengembangan Smart Regional (Smart City) Dalam Menghadapi Globalisasi Version 3.0 Dengan Menggunakan Metode Pdca & Usepsda. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 17, 44–53. <https://doi.org/10.54911/litbang.v17i0.106>
- Widiyastuti, ST., MT, I., Nupikso, D., Putra, N. A., & Intanny, V. A. (2021). Smart Sustainable City Framework: Usulan Model Kota Cerdas Yang Berkelanjutan dan Integratif. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 22(1), 13. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v22i1.3297>
- Yuhefizar, Sanjani, H., & Chadri, R. (2019). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Dengan Pendekatan Bottom-Up Berbasis Web Di Sumatera Barat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri ”*, 2, 10.

